

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Pada periode sebelumnya telah dilakukan penelitian-penelitian tentang penyaluran kredit BPR, sehingga bisa dijadikan acuan untuk penulis dalam menyusun karya tulis ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut, antara lain :

3.1. Penelitian Agus Prayitno (2004)

Penelitian yang dilakukan ini mengambil judul " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kurun Waktu 1994:1-2003:4 (Pendekatan Partial Adjustment Model / PAM) "

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa :

1. Diduga jumlah penghimpunan dana bank, tingkat suku bunga kredit, dan jumlah kredit yang diberikan sebelumnya (-1) secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.
2. Diduga jumlah penghimpunan dana bank berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan.
3. Diduga tingkat suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan
4. Diduga jumlah kredit yang diberikan sebelumnya (-1) berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan

Analisis dari penelitian ini menyatakan adanya persamaan, yaitu :

$$K_{BPR} = \beta_0 + \beta_1 JDB + \beta_3 K_{BPR} (-1)$$

Dimana :

K_{BPR} = Jumlah kredit yang diberikan BPR

JDB = Jumlah penghimpunan dana bank

SBK = Tingkat suku bunga kredit

K_{BPR} = Jumlah kredit yang diberikan sebelumnya

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama jumlah penghimpunan dana bank, suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat dan jumlah kredit yang diberikan sebelumnya memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu dari tahun 1994:1 sampai dengan tahun 2003:4 dan didalam penelitian ini tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik yaitu: uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
2. Secara individu variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta artinya bahwa besar kecilnya penyaluran kredit sangat dipengaruhi oleh perubahan jumlah penghimpunan dana bank, suku bunga kredit, serta jumlah penyaluran kredit yang diberikan sebelumnya. Besarnya pengaruh tersebut adalah sebagai berikut :

- Suku Bunga Kredit

Dari hasil pengujian statistik, diperoleh nilai koefisien untuk variabel suku bunga kredit sebesar 0.238423. Hal tersebut memberi arti bahwa kenaikan 1% dari suku bunga kredit akan menaikkan penyaluran kredit kepada masyarakat dari Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0.238423%, dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari suku bunga kredit terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dengan naiknya suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat ternyata justru menaikkan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat karena besarnya tingkat keuntungan yang diinginkan BPR oleh tersebut.

- Jumlah Penghimpunan Dana Bank (JDB)

Variabel kedua yang diestimasi adalah jumlah Penghimpunan Dana Bank (JDB), dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien untuk variabel JDB sebesar 0.552465. Hal tersebut memberi arti bahwa kenaikan 1% dari JDB akan menaikkan penyaluran kredit kepada masyarakat dari bank perkreditan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0.552465% dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari JDB terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Adapun jumlah penghimpunan dana bank untuk Bank Perkreditan Rakyat diperoleh dari dana pihak ketiga yang berasal dari tabungan dan deposito.

- Jumlah kredit yang diberikan sebelumnya

Variabel jumlah kredit yang diberikan sebelumnya digunakan sebagai variabel tambahan, dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien untuk variabel jumlah kredit yang diberikan yang sebelumnya sebesar 0.395244. Hal tersebut memberi arti bahwa kenaikan 1% dari jumlah kredit yang diberikan sebelumnya akan menaikkan penyaluran kredit kepada masyarakat dari bank perkreditan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0.395244%. Artinya bahwa jumlah kredit yang diberikan sebelumnya dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit yaitu sebesar 0.395244 juta rupiah, hal tersebut disebabkan karena dengan didorong kebiasaan maka pihak perbankan tidak mengubah penyaluran kredit kepada masyarakat segera apabila terjadi perubahan dalam penyaluran kredit.

3.2 Penelitian Sadwianto Kurniawan (2001)

Penelitian ini mengambil judul " Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Kredit Usaha Kecil Oleh Bank di Indonesia Tahun 1992-1997 "

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Jumlah dana yang dikumpulkan oleh bank berpengaruh positif terhadap penyaluran KUK di Indonesia.
2. Tingkat suku bunga deposito diduga berpengaruh secara positif terhadap penyaluran KUK di Indonesia.
3. Perubahan (naik turunnya) tingkat kurs diduga berpengaruh secara positif terhadap penyaluran KUK di Indonesia.

4. Inflasi di Indonesia diduga berpengaruh secara negatif terhadap penyaluran KUK di Indonesia.

Dengan hipotesis seperti diatas maka dapat dirumuskan fungsi Kredit Usaha Kecil:

$$KUK = \beta_0 + \beta_1 DB + \beta_2 ID + \beta_3 IDR + \beta_4 INF + U$$

Dimana:

KUK = Nilai kredit usaha kecil dalam milyar rupiah

DB = Jumlah dana yang dihimpun oleh bank dalam milyar rupiah

ID = Tingkat suku bunga riil dalam %

IDR = Nilai kurs rupiah terhadap dollar US dalam ribu rupiah

INF = Nilai inflasi dalam %

Sesuai dengan hipotesis dan fungsi Kredit Usaha Kecil yang telah dirumuskan, maka penelitian ini mengambil keputusan:

1. Secara keseluruhan variabel-variabel independen (dana bank, suku bunga, kurs, dan inflasi) berpengaruh terhadap variabel dependen (KUK). Dan berdasarkan uji R yang cukup tinggi mendekati 1 (satu).
2. Dan juga perlu dilakukan adanya pengkajian secara terus-menerus tentang sektor usaha kecil di Indonesia mengingat sektor ini menduduki peran yang strategis dalam pembangunan nasional baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari sisi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan.
3. Hubungan antara fungsi suku bunga deposito dengan variabel inflasi ternyata tidak memberikan pengaruh nyata yang signifikan, hal ini dapat dikarenakan pertama, masyarakat kelas menengah kebawah yang memiliki dana tidak

memiliki akses ke pasar modal sehingga mereka tidak mempunyai pilihan menyimpan uangnya di bank, selanjutnya pihak perbankan dalam melihat hal ini karena terjadi permintaan tidak akan memberikan respon yang positif karena selain pihak perbankan mengetahui dana yang ada di masyarakat, tidak akan dilarikan ke pasar modal. Kedua, apabila terjadi kenaikan inflasi maka apabila diikuti kenaikan suku bunga deposito maka pihak perbankan akan kesulitan dalam menyatukan kembali dana yang ada kepada pihak pengusaha karena secara langsung akan mempengaruhi suku bunga kredit akan meninggi pula, dan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan bertambahnya jumlah kredit macet. Sehingga hipotesa yang menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga deposito ditolak.

4. Melihat hasil regresi fungsi dana bank terhadap suku bunga deposito ternyata tidak signifikan terhadap jumlah dana bank yang berhasil dikumpulkan. Hal ini dikarenakan untuk mencari upaya peningkatan bagi dana bank, pihak perbankan tidak hanya menggunakan instrumen suku bunga deposito untuk mencapai hal tersebut, karena sebagaimana diketahui selain menggunakan suku bunga deposito pihak perbankan juga dapat menggunakan instrumen lain untuk meningkatkan dana seperti pemberian hadiah yang diundi dalam setiap periode tertentu, pelayanan yang cepat dan dengan kemudian fasilitas (tidak banyak birokrasi), pembukaan kantor cabang baru, menciptakan produk-produk unggulan yang baru, hal ini terlihat jelas setelah dikeluarkan paket deregulasi Oktober 1988 banyak pihak perbankan swasta nasional menarik nasabah dari bank milik pemerintah. Sehingga hipotesa yang

menyatakan suku bunga deposito berpengaruh positif terhadap dana bank ditolak.

5. Variabel dana bank mempunyai koefisien yang positif dan signifikan terhadap Kredit Usaha Kecil. Sebagaimana diketahui tentang adanya kebijakan pemerintah pada bulan Januari 1990 (PAKJAN 1990) tentang kewajiban perbankan untuk menyalurkan dana yang memiliki sebesar 20% dari seluruh total kredit yang disalurkan agar diberikan pada sektor usaha kecil. Hal ini berarti secara umum dapat dikatakan bahwa dengan adanya kenaikan jumlah dana perbankan akan memberikan pula dampak terhadap kenaikan penyaluran kredit bagi sektor usaha kecil. Sehingga hipotesa yang menyatakan dana bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit usaha kecil diterima.
6. Penelitian membuktikan bahwa penggunaan model regresi linier adalah tepat yang ditunjukkan oleh nilai R^2 dan F statistik yang tinggi. Dan hasil pengujian regresi yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik yaitu uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

3.3. Penelitian Sri Yunanto (1998)

Penelitian yang dilakukan ini mengambil judul " Perkembangan Kredit Perbankan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997-1996 "

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

1. Perkembangan kredit perbankan semakin mengalami kenaikan dengan semakin pesatnya pertumbuhan bank-bank

2. Perkembangan kredit perbankan semakin mengalami kenaikan dengan semakin turunnya suku bunga kredit
3. Perkembangan kredit perbankan semakin mengalami kenaikan dengan semakin naiknya posisi tabungan masyarakat di DIY

Analisis dari penelitian ini menyatakan adanya persamaan, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U$$

Dimana :

- Y = Perkembangan kredit perbankan
 X₁ = Jumlah kantor bank (dalam satuan unit)
 X₂ = Tingkat suku bunga kredit (dalam % per tahun)
 X₃ = Tabungan (dalam rupiah)

Dengan adanya hipotesis dan analisis persamaan tentang perkembangan kredit perkembangan di Propinsi DIY, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Perkembangan kredit perbankan selama tahun 1997 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di Propinsi DIY. Hal ini membuktikan dengan makin meningkatnya jumlah kredit yang diberikan oleh dunia perbankan di Propinsi DIY dengan kenaikan sebesar 26,9% setiap tahunnya.
2. Peningkatan kredit tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kantor bank, yang sejak paket 27 Oktober 1988 mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisiensi regresi (b₁) = 407.2313 yang berarti kenaikan jumlah kantor bank sebesar 1 unit menyebabkan kenaikan jumlah kredit sebesar Rp 407.2313 juta. Perubahan jumlah kredit perbankan searah dengan perubahan jumlah kantor bank karena koefisien variabel X₁ (jumlah

kantor bank) positif, dan hubungan antara keduanya erat karena nilai $R^2 = 0.5055$ (mendekati 1)

3. Peningkatan kredit perbankan juga sejalan dengan jumlah tabungan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi (b_3) = 0, 2451 yang berarti setiap ada penambahan tabungan sebanyak satu juta rupiah, maka akan meningkatkan perkembangan kredit perbankan sebesar 0.2451 juta rupiah. Perubahan tabungan masyarakat searah dengan perkembangan kredit perbankan karena koefisien variabelnya positif dan hubungan antara keduanya erat karena $R^2 = 0.8554$ (mendekati satu)
4. Untuk tingkat bunga kredit mempunyai hubungan yang negatif terhadap perkembangan kredit perbankan, yang artinya apabila ada kenaikan tingkat bunga kredit maka akan menurunkan jumlah kredit perbankan, begitu pula sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi (b_2) = -10.170, 6333 yang mempunyai koefisien variabel bernilai negatif
5. Secara umum dari ketiga variabel independen tersebut semuanya berpengaruh terhadap perkembangan kredit perbankan, hal ini dapat dilihat dari nilai $R^2 = 0.9754$ yang berarti mendekati satu dan variabel independen tersebut erat hubungannya dengan variabel dependennya.
6. Perkembangan kredit perkembangan selama tahun 1977 sampai dengan tahun 1996 di Propinsi DIY dan kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah (deregulasi) menunjukkan hubungan yang erat karena BI selaku bank sentral berkewajiban memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit. Dalam rangka menuju kearah perkembangan perbankan yang sehat, BI menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas serta

peraturan-peraturan lainnya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1 Pengertian kredit

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Menurut ketentuan pasal 1 angka (11) UU No 10 th 1998 :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga"

Jadi menyalurkan dana adalah memberikan kredit. Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis dapat dirinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit seperti berikut ini :

- (a) Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank
- (b) Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan, misalnya pembiayaan pembuatan rumah, pembelian kendaraan
- (c) Kewajiban pihak peminjam (debitur) melunasi hutangnya menurut jangka waktu disertai pembayaran bunga
- (d) Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam uang antara bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama

Apabila ditelaah dengan teliti maka dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur esensial berikut ini :

➤ Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin kredit akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama

➤ Agunan

Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank

➤ Jangka waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi

➤ Resiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung resiko terhalang atau terlambat atau macetnya pelunasan kredit baik disengaja atau disengaja, resiko ini menjadi beban bank

➤ Bunga bank

Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

➤ Kesepakatan

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

Sebagai salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri yang berupaya untuk:

Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha (*performance*) dan terbukti sampai pada obyek kredit

Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih pada bank, debitur dan otorita moneter sehingga mampu menimbulkan *backward* dan *forward linkage* kepada masyarakat luas (Moh Tjoekam, 1999:2)

4.2 Jenis-Jenis Kredit

1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

a) Kredit modal kerja (Kredit eksploitasi atau Working Capital Credit)

Yaitu kredit yang dipergunakan untuk membelanjai modal lancar yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus atau perputaran. Misalnya, barang dagangan, bahan baku, upah, overhead produksi dan sebagainya.

b) Kredit Investasi

Kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. Kredit ini digunakan untuk

pembelian barang-barang modal atau barang-barang tahan lama atau aktiva tetap. Misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, alat-alat berat dan sebagainya.

c) Personal Loan

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.

2. Menurut Resiko Pembiayaan

a) Kredit dari dana bank yang bersangkutan

Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

b) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai agent of development khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan "Dana Likuiditas"

c) Kredit Kelolaan

Kredit ini diperoleh pemerintah Indonesia dari luar negeri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek swasta atau pemerintah yang diwujudkan dalam

bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan.

d) Kredit Konsorsium

Untuk membiayai proyek-proyek yang memerlukan dana yang besar dan dirasakan berat untuk ditanggung oleh suatu bank, maka dibentuklah konsorsium dari beberapa bank untuk membiayai kredit

e) Joint Financing

Pada intinya seperti konsorsium pada bank pemerintah, *joint financing* ini dapat terjadi antar bank-bank swasta nasional, bank asing yang beroperasi di Indonesia.

3. Menurut Sektor Ekonomi

a) Kredit sektor pertanian

Dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil atau produksi di sektor pertanian, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi. Ke dalam sektor pertanian ini, termasuk pula perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan sarana pertanian.

b) Kredit sektor pertambangan

Untuk keperluan penggalan dan pengambilan bahan-bahan tambang, baik dalam bentuk cair seperti : minyak bumi, gas bumi, biji logam, batu bara, nikel, emas dan barang-barang tambang lainnya.

c) Kredit sektor perindustrian atau Manufacturing

Kredit yang diberikan berkenaan dengan kegiatan usaha mengubah-ubah bentuk atau transformasi, meningkatkan faedah dengan mengolah baik secara mekanik maupun kimia, dari bahan sampai menjadi barang jadi. Apakah dengan mesin atau dengan tangan manusia.

d) Kredit sektor listrik, gas dan air

Diberikan untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.

e) Kredit sektor konstruksi

Diberikan kepada para kotraktor atau pemborong yang memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung, instalasi, jalan, pelabuhan, jembatan, irigasi dan lain-lain.

4.3 Prinsip-prinsip Perkreditan

Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. Penilaian kredit atau analisis kredit sangat mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian kredit adalah prinsip-prinsip perkreditan. Untuk menentukan nilai kredit dikenal beberapa formulasi atau prinsip penilaian permohonan perkreditan seperti prinsip 5C, prinsip 7P dan prinsip 3R. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu adalah pertama tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata jadi diberikan. Dengan analisis

kredit ini kemungkinan pemberian kredit yang diperkirakan di hari kemudian akan mengakibatkan kegagalan debitur dan kemacetan total kreditnya. Prinsip perkreditan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Watak atau kepribadian dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebagai yang paling penting sebelum memutuskan atau menetapkan untuk memberikan kredit kepadanya. Bank sebagai pemberi kredit perlu meyakini benar terlebih dahulu apakah calon debiturnya itu:

- Berkelakuan baik, dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berupaya untuk memenuhi janjinya.
- Tidak mempunyai predikat penjudi, pencuri, pemabuk atau penipu.

Pendek kata, calon debitur yang mempunyai reputasi baik sajalah yang dapat diteruskan pertimbangan permohonan kreditnya.

2. *Capacity*

Kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui pasti oleh bank (calon kreditur). Kemampuan pengusaha akan memberikan kejelasan kepada analisis sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapat pengusaha (seseorang atau badan), dari waktu ke waktu atau dari musim ke musim. Pendapatan seseorang atau badan atau pengusaha yang mampu akan terus meningkat dan diharapkan pula kelak ia akan mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya bila bank memberikan kredit yang diperlukan. Akan tetapi sebaliknya, bila ternyata ia tidak mampu dan tidak dapat diperkirakan mempunyai pendapatan maka bank

memperkirakan yang bersangkutan tidak akan dapat melakukan pembayaran-pembayaran atas kreditnya. Data sumber yang dapat dipergunakan oleh bank untuk itu, dapat diperoleh selain dari pembukuan dan catatan yang ada pada calon debitur juga dapat diperoleh dari instansi-instansi, jawatan, pejabat setempat dan sebagainya.

3. *Capital*

Modal calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank, selain dari jumlahnya perlu diketahui pula strukturnya. Mengapa bank harus mengetahui sampai sejauh itu ? Karena diperlukan untuk mengukur sampai seberapa besar tingkat ratio likuiditas dan solvabilitasnya. Analisis dalam keperluan ini akan memerlukan laporan keuangan dari calon debitur.

4. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yang menyangkut atau mempengaruhi atau mendorong calon debitur perlu mendapat sorotan bank. Mengapa ? Mungkin sekali terdapat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Maksudnya agar memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.

5. *Collateral*

Jaminan atas setiap kredit adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai tanggungan atau tanggungan. Andai pada suatu saat ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka tanggungan tersebut diambilalih atau dijual atau dilelang oleh kreditur setelah pengadilan memeberikan pengesahan. Dengan demikian kita dapatkan adanya dua fungsi mengenai jaminan tersebut, yaitu faktor penentu dalam pemberian kredit dan faktor pengaman atas kredit yang diberikan.

Sedangkan prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. *Party*

Merupakan golongan dari calon-calon peminjam. Bank perlu mengolongkan calon-calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut:

- Character
- Capacity
- Capital

Pengolongan ini akan memberi arah analisis bank, bagaimana ia harus bersikap. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

2. *Purpose*

Tujuan penggunaan kredit menurut calon debitur perlu segera dilakukan oleh bank mengingat erat sekali hubungannya dengan Economy Conditions. Bank

perlu tahu apakah kredit yang diminta calon debitur itu akan mempunyai aspek ekonomis dan aspek sosial yang positif.

3. *Payment*

Point ini termasuk kelanjutan dari *purpose*. Bila rencana penggunaan kreditnya telah diketahui serta tergolong kepada aspek yang memberikan dampak sosial dan ekonomis yang positif, analisis harus memperkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan akan cukup untuk dipergunakan pengembalian kredit dengan bunganya. Baik dengan sekaligus atau cicilan. Dalam hal ini tidak terbatas untuk kredit produktif saja, bila ada calon yang mengajukan kredit konsumtifpun penganalisisan kemampuan membayar harus dilakukan.

4. *Profitability*

Seseorang atau sesuatu badan calon debitur yang mampu memperoleh keuntungan dalam *forecast* usahanya, diukur dengan jumlah bunga dan ongkos-ongkos kreditnya harus dibayarnya. Bila ternyata diperkirakan masih mempunyai jumlah lebih setelah dikurangi dengan pokok kredit, bunga dan ongkos-ongkos, maka usahanya adalah baik.

5. *Protection*

Perlindungan atas perusahaan dan jaminan yang diberikan oleh calon kreditur itu cukup aman, perlu mendapat perhatian analisis. Hal ini sangat penting, untuk menghindari peristiwa yang mungkin timbul sedangkan tidak dapat diperkirakan apakah akan terjadi atau tidak.

6. *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan, dan sebagainya), hobby, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat (*social standing*) dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

7. *Prospect*

Prospect merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi atau perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

Untuk prinsip 3R dalam permohonan kredit adalah:

1. *Returns/Returning* (Hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

2. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Pembayaran kembali oleh debitur kelak harus dapat diramalkan oleh analisis. Hal ini ada hubungannya dengan rencana penetapan schedule pengembalian kreditnya.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Pengandaian analisis dikaitkan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Untuk

menutupnya, akan tampak suatu kemudahan untuk kemudian hari, bila ada jaminan dan atau asuransi. (Hadiwidjaja, 1990:34 - 39)

4.4 Falsafah perkreditan

Non one likes to be in debt. Tidak seorangpun pada hakikatnya mau terlibat hutang, demikian kira-kira pandangan umum dalam kehidupannya ini. Akan tetapi mengapa justru demikian populernya kredit dan malahan orang-orang selalu berusaha untuk memperolehnya ? Disinilah kiranya kita perlu untuk berfilsafat, yaitu berusaha mengetahui apa hakikat yang terkandung dalam pengertian kredit, apa masalahnya dan apa masalahnya juga bagaimana pemecahannya. Bank dan kreditnya tidak dapat melepaskan diri dari gerak perekonomian dan perdagangan. Di dalam ekonomi diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia selalu berusaha untuk mencapai hasil. Salah satu sumber dan faktor penting dalam ekonomi adalah permodalan. Pada hakikatnya masalah permodalan adalah masalah hidup matinya suatu usaha. Bank selaku lembaga pembantu modal di satu pihak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membantu mereka yang membutuhkan permodalan, di lain pihak pengusaha akan selalu mencari sumber-sumber permodalan untuk menjamin kontinuitas dan atau meningkatkan usahanya. Disinilah kemudian timbul sifat ketergantungan satu sama lain.

Sebagai lembaga keuangan bank adalah lembaga penghimpun dana dan sebagai lembaga kredit. Dalam menjalankan kedua tugas pokok ini bank dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa sumber operasinya adalah justru berada pada masyarakat. Untuk menghimpun dana, bank harus ke masyarakat dan demikian pula untuk melepaskan kredit dan jasa-jasa bank dalam memperlancar tujuan usahanya.

Timbulah kemudian langkah-langkah menyelaraskan atau menyesuaikan antara keduanya. Dalam melakukan penyesuaian ini terdapat maksud yang selaras yaitu merupakan tujuan setiap usaha : "memperoleh keuntungan" dan tujuan *profit making*. Dengan demikian "kredit" merupakan mediator untuk mempertemukan kepentingan yang sama itu dan karenanya kredit harus dapat menempatkan dirinya sebagai perangsang bagi kedua pihak. Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank, tercermin dalam dunia kegiatan pokok bank tadi yaitu *receive deposits* (menerima atau menghimpun dana) and *to make loans* (memberikan kredit). Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai obyek. Para penyimpan mengharapkan keuntungan (materiil atau non materiil) dari uang yang disimpannya, misalnya berupa bunga dan jasa-jasa lainnya. Sebaliknya bank memperoleh keuntungan bahwa uang yang mengendap itu dapat diperolehnya dalam bentuk kredit dan daripadanya bank mengharapkan profit. Sebaliknya si penerima kredit memperoleh pula keuntungan bahwa masalah permodalannya dapat diatasi sehingga peningkatan produktivitas dapat dilakukan dan sekaligus mengharapkan pertambahan *profit*. Timbulah keadaan yang *interdependence*, yaitu saling membutuhkan antara bank dan pengusaha. Masalahnya tidaklah berhenti sampai disini saja. Tujuan *profitability* diimbangi oleh perasaan agar terdapat *safety* bagi kedua belah pihak . Bank mengharapkahn kreditnya *safe*, demikian pula pengusaha mengharapkan keadaan yang aman selama dia berusaha meningkatkan produktifitas.

Dengan dua tujuan yang terkandung dalam uraian diatas, sebenarnya telah kita ketahui bahwa dalam meneropong masalah perkreditan dewasa ini disadari atau tidak masalah perkreditan telah sedemikian kompleks dan bahkan merupakan pendorong keberhasilan kaum pengusaha. Hakikat atau intisari pengertian kredit

adalah kepercayaan. Kredit merupakan barometer suatu pengukur, apakah seseorang pengusaha sukses atau tidak. Makin besar kredit diberikan, makin besar pula usahanya dan makin besar kepercayaan orang dan makin berkembanglah pengusaha itu. Sekarang ini terlalu terjawab pernyataan tentang hakikat bahwa tidak seorangpun sebenarnya ingin terlibat utang, karena kredit bukanlah hanya sekadar utang, tetapi suatu modal, suatu alat untuk mencapai tujuan usaha, suatu teman di kala susah, teman di kala ingin maju dan teman setelah maju. Kredit adalah teman pengusaha selama-lamanya, selagi usahanya itu masih ada. (Muchdarsah Sinungan.1994:186)

4.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, muncul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan (*safety*) yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin

pengembaliannya sehingga keuntungan atau *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Keuntungan (*profitability*) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara :

- Kepentingan pemerintah
- Kepentingan masyarakat
- Kepentingan pemilik modal (pengusaha). (Thomas suyatno,1993:15)

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dll. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - (a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - (b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1996, yang lebih kurang berkisar 650%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha akan memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek

tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

(Thomas Suyatno, 1993:16)

4.6 Manfaat Perkreditan

Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh bank-bank. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung tersebut adalah bank dan calon debitur, karena kedua belah pihak inilah yang pertama-tama akan menerima manfaat dari perkreditan itu secara langsung. Sedangkan pihak pemerintah dalam hal ini penguasa moneter dan masyarakat luas akan menerima atau merasakan manfaat perkreditan itu secara tidak langsung.

1. Dari sudut kepentingan debitur

Peranan perkreditan dalam fungsinya sebagai supplier dana atau modal bagi suatu perusahaan disamping berbagai sumber dana yang lain. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan:

1. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible.
2. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit)
3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.
4. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
5. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain, yaitu:
 - ✓ Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukaan L/C import, bank garansi dan lain-lain
 - ✓ Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis kepada para debiturnya.
6. Rahasia keuntungan debitur akan lebih terlindungi karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan.
7. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
8. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan

suatu resiko sengketa di kemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai penyedia dana.

9. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang.

2. Ditinjau Dari Sudut Kepentingan Perbankan

Salah satu kegiatan pokok perbankan yaitu menerima atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan ini (*financial intermediary*) bank akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

- a) Memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur, dikurangi dengan biaya untuk memperoleh dana dari masyarakat dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya overhead dalam mengelola kredit tersebut.
- b) Menjaga solvabilitas usahanya, dimana secara teknis struktur dana dari perbankan mempunyai *financial leverage* yang tinggi, karena pemeliharaan sumber-sumber dana mengandung suatu beban yang tinggi sehingga dana-dana tersebut tidak menganggur (*idle fund*) dan harus menghasilkan.
- c) Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain agar semua kegiatan keuangan yang ada harus disalurkan lewat bank yang bersangkutan seperti transfer, wesel, clearing, inkaso untuk menampung kegiatan keuangan debitur.

3. Ditinjau Dari Sudut Kepentingan Pemerintah

Kegiatan pemberian kredit dari perbankan telah merupakan suatu jaringan usaha dalam suatu sistem perekonomian di hampir setiap negara, baik pada negara yang sedang berkembang maupun pada negara-negara yang sudah maju sehingga perkreditan merupakan alat dari penguasa moneter dalam mengatur mekanisme perekonomian disuatu negara. Kepentingan pemerintah secara lebih spesifik terhadap kegiatan perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Efek perkembangan tersebut akan lebih pesat lagi bila dalam pemberian kredit tersebut juga disertai dengan berbagai kemudahan dan pemberian suku bunga yang relatif rendah.
- b) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter bahwa inflasi merupakan alternatif cost bagi suatu pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu tingkat inflasi harus dikendalikan sampai batas-batas tertentu antara lain melalui mekanisme dalam pemberian kredit oleh perbankan.
- c) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha atau kegiatan. Dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang lengkap akan memberikan peluang kesempatan kegiatan business bagi pihak yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut.
- d) Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat artinya semakin besar kegiatan usaha yang dikuasai maka akan memungkinkan untuk menerima pendapatan yang semakin besar dan semakin besar pula terjadinya pemerataan pendapatan.

4. Ditinjau Dari Kepentingan Masyarakat Luas

Masyarakat luas sebetulnya tidak mempunyai kepentingan langsung atas kegiatan per kreditan yang diberikan oleh perbankan. Namun ada kepentingan tidak langsung yang diharapkan dapat ikut dinikmati dari per kreditan yang disalurkan oleh perbankan, antara lain:

- a) Dengan adanya kelancaran dari proses per kreditan diharapkan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha-lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.
- b) Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, assets appraisal akan menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit bank, antara lain:
 - ◆ Konsultan dalam penyusunan project proposal, feasibility study
 - ◆ Akuntan publik dalam memeriksa neraca dan laporan perhitungan laba rugi dari debitur
 - ◆ Notaris dalam pembuatan ikatan perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan
 - ◆ Asset appraisal dalam penilaian barang-barang yang akan dijamin
- c) Masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara atau prosedur yang mudah, cepat dengan biaya yang relatif murah.

- d) Bagi para pengelola pasar modal maka kebijaksanaan perkreditan terutama tentang suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatannya karena merupakan jasa substitusinya satu sama lain.

4.7. Kebijakan Perkreditan

Dalam perkembangan bisnis perbankan yang mengarah pada "*one stop shopping bank*" maka permasalahannya akan semakin rumit, karena perkreditan itu sendiri akan saling berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya dan akan membentuk network yang tidak putus-putusnya. Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka perlulah sesuatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan perkreditan (*credit policy*). Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut :

- (a) Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi
- (b) Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan
- (c) Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank abilititynya
- (d) Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit). Disini tersirat pertimbangan yuridis dari revenue (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit)

- (e) Overdarft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang
- (f) Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai)
- (g) Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan safety). (Thomas Suyatno, 1993: 15-16)

Sebagai lembaga kredit, bank memang harus menentukan policy yang harus ditempuhnya dan harus dapat menyelami dengan sungguh-sungguh kondisi-kondisi perekonomian dan perdagangan yang merupakan landasan bagi usahanya. Pada umumnya dalam penentuan policy perkreditannya beberapa faktor penting haruslah diperhatikan dengan seksama :

1. Bagaimana keadaan keuangan bank saat ini?
Manajemen melihatnya dari kekuatan keuangan bank antara lain jumlah deposito, tabungan, giro, dan jumlah kredit. Setiap items dari aktiva diteliti benar-benar dan pemisahan menurut pos-pos yang current (lancar) dan non current (aktiva tetap).
2. Pengalaman bank dalam beberapa tahun, harus dipelajari terutama yang berhubungan dengan dana dan perkreditan. Diperhatikan bagaimana fluktuasinya, terutama mengenai jumlah dan lama pengendapan kelancaran kredit yang diberikan.
3. Keadaan perekonomian, harus dipelajari dengan seksama dan dihubungkan dengan pengalaman serta kestabilan bank-bank di masa-masa lalu serta perkiraan keadaan yang akan datang.
4. Kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan bank.

Yang dimaksudkan apakah dalam pengelolaan kredit, bank tetap survive dan bahkan meningkat terus atau tidak. Apakah pula organisasi kredit yang ada telah benar-benar efektif dan dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi. Apakah pejabat-pejabat kredit adalah tenaga-tenaga qualified, mempunyai skill yang baik dan sebagainya.

5. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis.

Dimaksudkan disini adalah bank-bank yang mempunyai *lone of business* yang sama dan bagaimana hubungannya. Hal ini perlu diadakan evaluasi terus menerus. Bagaimana tentang *joint financing* atau merger dalam kredit dan bagaimana pelaksanaannya selama ini. (Muchdarsyah Sinungan,1994:188)

Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan harus diperhatikan 3 asas pokok yaitu :

1. Asas Likuiditas

Yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Hal ini dapatlah dipahami karena sebagian dana yang dimiliki dan disalurkan dalam bentuk perkreditan berasal dari masyarakat. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- Bank tersebut memiliki assets lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarannya.

- Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang.

Dengan demikian pengelolaan likuiditas akan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan penyediaan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi ketentuan penguasa moneter yang berlaku serta dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerjanya sendiri.

2. Asas Solvabilitas

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaan perkreditan maka bank harus pandai-pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat-surat berharga pada suatu tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin. Kiranya hal ini mudah untuk dipahami sebab assets bank dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga ini akan merupakan sumber utama bagi bank untuk menutup segala hutang bank kepada para girant atau deposant apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan akan menarik dananya dari bank tersebut. Jadi masalah inilah yang mendorong Top Manajement suatu bank untuk dapat mengarahkan kebijaksanaan dalam pemberian kredit yang sehat, mengarahkan sasaran pemberian kredit secara tepat dan lain-lain. Sehingga kredit-kredit yang diberikan tersebut harus dapat dikuasai oleh para debitur tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan agar tidak merusak schedule perencanaan kredit yang telah disusun. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas suatu bank dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Jika bank sudah sedemikian parahnya sehingga operasinya (kegiatannya) terpaksa dihentikan. Dalam keadaan yang demikian, bank dinilai dengan cara apakah mampu membayar hutang-hutangnya. Aktiva-aktiva yang dimiliki bank

harus dinilai menurut nilai likwidasi, artinya menurut harga jual aktiva-aktiva tersebut. Biasanya nilai likwidasi lebih rendah dari nilai aktiva bank seandainya berada dalam keadaan beroperasi.

- 2) Perbandingan antara aktiva (material) dengan seluruh hutang. Makin besar rasio tersebut, maka makin besar kemungkinan bahwa bank tersebut mampu membayar hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

3. Asas Rentabilitas

Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik pada untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari para debitur. Pada negara-negara yang sedang berkembang pendapatan bunga dari perkreditan merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi perbankan. Keberhasilan bagian kredit suatu bank dalam mengumpulkan penerimaan bunga akan merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya bank yang bersangkutan. (Teguh Pudjo Mulyono, 1990:17)

Dengan laba bank akan lebih mampu melaksanakan operasinya. Dan laba itu pula merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap. Dan itupun tidak lepas dari kepercayaan pemegang saham dan masyarakat yang menyimpan uangnya berupa giro, deposito, tabungan di bank tersebut. Makin besar keuntungan suatu bank biasanya makin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Justru kepercayaan masyarakatlah

modal utama bagi bank. Jika kepercayaan masyarakat kepada suatu bank makin besar, maka kemungkinan dana-dana yang akan disimpan pun lebih besar. Setiap bank dalam menyalurkan dana-dananya sering menghadapi masalah yang saling bertentangan antara keamanan dan keuntungan (*safety and profitability*). Untuk menilai rentabilitas suatu bank dapat dipergunakan dengan perhitungan rasio, yaitu: perbandingan antara laba bersih (sebelum dikurangi pajak) dengan hak pemilik. Yang dimaksud dengan hak pemilik adalah bagian hak pemilik atau pemegang saham sesudah kewajiban-kewajiban berupa hutang-hutang jangka pendek, menengah dan hutang-hutang lainnya dipenuhi. Rasio dapat menjadi ukuran daya suatu bank mencari laba. (O.P Simorangkir, 1979:100)

4.8. Variabel Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit

1. Penghimpunan Dana Bank

Sumber utama dana Bank Perkreditan Rakyat dalam usahanya menghimpun dana berasal dari simpanan dalam bentuk deposito berjangka (*time deposit*) dan tabungan (*saving deposit*). Kedua jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional BPR. Sumber-sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun dari nasabah institusi. Disamping itu sumber dana bank dapat pula berasal dari modal sendirinya dan modal lainnya yang tidak termasuk dari kedua sumber tersebut diatas. (Dahlan siamat, 1995:71)

Dana-dana yang telah berhasil dihimpun disalurkan dalam berbagai macam bentuk penggunaan dana dengan tujuan dasar untuk memperoleh

penerimaan. Salah satunya melalui pemberian kredit atau jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan pos harta dan sumber penghasilan terbesar dari perbankan. Mengingat penyaluran kredit ini merupakan aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain. Ditinjau dari segi likuiditasnya, penyaluran kredit mempunyai tingkat likuiditas yang lebih rendah daripada cadangan primer dan sekunder. Lebih lanjut likuiditas penyaluran kredit juga bervariasi tergantung pada jangka waktu kredit dan kolektibilitas atau kemungkinan tertagihnya. (Y.Sri Yunanto,2000:101)

Jumlah penghimpunan dana bank mempunyai korelasi positif terhadap jumlah kredit yang diberikan. Artinya bahwa semakin besar kemampuan BPR dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berupa deposito berjangka dan tabungan, maka jumlah kredit yang dialokasikan juga semakin tinggi. Hal ini terkait juga dengan tingkat kesehatan bank dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR tersebut. Karena semakin sehat kondisi suatu BPR maka akan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan penghimpunan dananya kepada BPR tersebut. Dan tentunya masyarakat tidak ragu lagi untuk melakukan kredit karena adanya jaminan keamanan terhadap kesehatan bank.

2. Tingkat Suku Bunga Kredit

Tingkat bunga simpanan ditambah dengan unsur dijadikan dasar untuk menentukan tingkat bunga kredit bank. Semakin tinggi tingkat

efisiensi kinerja suatu bank akan menyebabkan komponen-komponen yang ditambahkan pada tingkat bunga simpanan untuk membentuk tingkat bunga kredit. (Y.SriYunanto,2000:101)

Suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat. Artinya bahwa dari segi penawaran dengan penetapan tingkat suku bunga yang tinggi maka akan mendorong peningkatan jumlah total kredit yang disalurkan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR cenderung untuk menetapkan tingkat suku bunga kredit yang tinggi agar memperoleh pendapatan yang besar dari penyaluran kredit. Karena memang pendapatan bunga dari penyaluran kredit merupakan pos terbesar sumber penghasilan BPR dalam menghimpun dana. Sehingga dengan tersalurkannya kredit kepada masyarakat maka fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan dengan baik. Artinya bahwa di dalam BPR tersebut lalu lintas perputaran uang dari masyarakat penyimpan kepada masyarakat peminjam dapat berjalan lancar sehingga dapat menekan jumlah dana menganggur.

3. Total Aset

Total aset sama artinya dengan total aktiva, yang mengalokasikan dana-dana bank. Sisi aktiva (total aset) menggambarkan kekayaan harta benda, milik atau hak dari bank. Aset terdiri dari 3 kategori yaitu cadangan kas, aktiva yang produktif dan aktiva tetap. Total aset yang dihimpun pihak bank dari ketiga kategori tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat. Artinya bahwa

semakin besar atau semakin bertambahnya aset BPR maka akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk menyalurkan kredit mereka kepada masyarakat. Hal tersebut juga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang bersangkutan. Semakin berkembangnya total aset berarti pihak BPR sendiri telah mampu mempertahankan kecukupan modal sebagai pegangan yang kuat.

BAB V

METODOLOGI PENELITIAN DAN HIPOTESA

5.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah kredit yang diberikan sebagai variabel dependen serta jumlah penghimpunan dana bank, tingkat suku bunga kredit dan total aset sebagai variabel independen. Jenis data yang digunakan berupa data menurut dimensi waktu yaitu data silang tempat (*cross section*), artinya data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu. Data yang digunakan adalah laporan rekapitulasi neraca bulanan PD BPR BKK se-Kabupaten tutup bulan Januari 2004. Sedangkan sumber data diperoleh dari:

1. Bagian perekonomian Setda Kabupaten Pati
2. PD BPR BKK pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pati

5.2. Metode Pengumpulan Data

Obyek penelitian ini difokuskan pada PD BPR BKK Kabupaten Pati. Penulis ingin memperlihatkan kemampuan perusahaan daerah BPR BKK tersebut dalam melayani masyarakat kecil sampai menengah. Jumlah populasi yang tersedia sebanyak 20 PD BPR BKK dan penulis mengambil jumlah tersebut sebagai sample dalam penelitian ini.

Data-data yang diperlukan untuk mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui metode data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

5.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu metode yang didasarkan pada analisa-analisa yang dinyatakan dengan menggunakan rumus-rumus. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan, maka lebih dahulu ditentukan dalam variabel jumlah penghimpunan dana bank, suku bunga kredit dan total aset yang mana faktor-faktor tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan perubahan pada penyaluran kredit. Berkaitan dengan studi empiris ini, untuk menggunakan data yang diperoleh dan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen maka digunakan suatu analisis regresi linier. Analisis dari penelitian ini menyatakan adanya persamaan yaitu:

$$KBPR = \beta_0 + \beta_1 SBK_{JN} + \beta_2 DJN + \beta_3 AJN$$

Dimana:

KBPR = Jumlah kredit yang diberikan BPR (ribuan rupiah)

SBK = Suku bunga kredit yang diberikan BPR
(persen per tahun)

DJN = Jumlah penghimpunan dana BPR (ribuan rupiah)

AJN = Total aset BPR (dalam ribuan rupiah)

5.3.1 Pengujian Statistik

5.3.1.1. Uji t-statistik

Yaitu pengujian hubungan regresi secara parsial dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat keberartian hubungan masing-masing koefisien regresi variabel-variabel dependen. Uji t ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, hal ini berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. $H_a : \beta_1 > 0$, hal ini berarti ada pengaruh positif variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t yang diperoleh dari perhitungan dengan nilai t yang ada pada tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitungnya $< t$ tabel, maka hipotesis H_0 diterima dan hipotesis H_a ditolak.
2. Jika nilai t hitungnya $> t$ tabel, maka hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis H_a diterima

5.3.1.2. Uji F-statistik

Pengujian kedua yaitu pengujian variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat dilakukan dengan F-test. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bila hasil pengujian menunjukkan nilai:

1. $H_0 : \beta_0 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen
2. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Jika F hitung telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai F hitung $<$ F tabel, maka hipotesis H_0 diterima dan hipotesis H_a ditolak.
2. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis H_a diterima.

5.3.1.3. Koefisien Determinasi Berganda

Pengujian ini adalah melalui koefisien determinasi. Pengujian ini ditujukan untuk melihat kemampuan variabel-variabel independen dalam menerapkan variabel dependennya. R^2 ini nilainya terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$) dimana semakin tinggi R^2 maka semakin baik.

5.3.2 Pengujian Asumsi Klasik

5.3.2.1. Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada runtut waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau cross sectional data). Adapun cara mendeteksi suatu data ada atau tidaknya

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel penjelas. Pengujian Durbin-Watson yaitu dengan menempatkan d statistik ke dalam daerah pengujian autokorelasi yang disusun setelah mengetahui dL serta dU . Nilai mekanisme DW tersebut adalah:

$0-dL$ = daerah autokorelasi positif

$dL-dU$ = daerah keragu-raguan

$dU-(4-dU)$ = daerah tidak ada autokorelasi

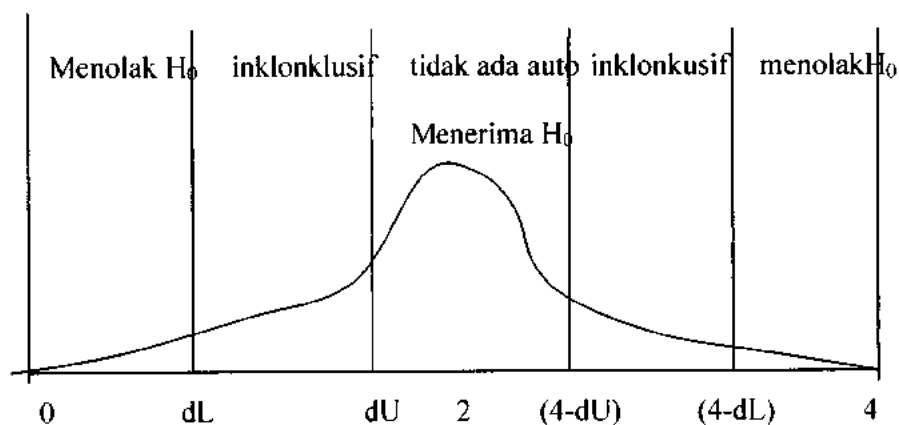
$(4-dL)-(4-dU)$ = daerah autokorelasi negatif

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1

Uji Autokorelasi

F(d)



5.3.2.2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Asumsi mengenai faktor-faktor gangguan adalah distribusi probabilitas gangguan tetap sama untuk seluruh pengamatan-pengamatan

atas X , yaitu varian U_1 adalah sama untuk seluruh nilai-nilai variabel bebas. Homogenitas varian (atau varian konstan) ini dikenal sebagai homoskedastisitas (*homoscedasticity*). Ada kasus dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Kondisi varian nir-konstan atau varian nir-homogen ini disebut heteroskedastisitas (*heteroscedasticity*). (Gunawan Sumodiningrat.1993:261)

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian *park*. Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa σ^2 adalah suatu fungsi yang menjelaskan X . Bentuk fungsi yang disarankan adalah

$$\sigma^2 = \sigma^2 X^\beta e^v$$

atau

$$\ln \sigma^2 = \ln \sigma^2 + \beta \ln X + v$$

dimana v_1 adalah unsur gangguan (*disturbance*) yang stokhastik. Karena σ^2 biasanya tidak diketahui, Park menyarankan untuk menggunakan e^2 sebagai pendekatan dan melakukan regresi berikut:

$$\begin{aligned} \ln e^2 &= \ln \sigma^2 + \beta \ln X + v \\ &= \alpha + \beta \ln X + v \end{aligned}$$

Jika ternyata β signifikan (penting) secara statistik, ini akan menyarankan bahwa dalam data terdapat heteroskedastisitas. Apabila ternyata tidak signifikan, kita bisa menerima asumsi homoskedastisitas. Pengujian Park menggunakan prosedur 2 tahap yaitu, tahap pertama melakukan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas. Kita memperoleh e dari regresi ini dan kemudian dalam tahap kedua kita melakukan regresi.

5.3.2.3. Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu asumsi dimana satu atau lebih dari variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier diantara variabel-variabel dalam model regresi. Dengan mengikuti teori Klein yaitu dengan melakukan regresi antara variabel penjelasnya (independen) untuk mengetahui besarnya R^2 dari masing-masing hubungan antar variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari R^2 keseluruhan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model yaitu:

- a) Nilai R^2 yang yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b) Menggunakan cara regresi parsial, caranya:
 1. Lakukan estimasi pada model awal $Y = f(X_1, X_2, X_3)$, dapatkan nilai R^2 -nya.
 2. Lakukan auxiliary regression antar variabel penjelas.
 3. Nilai R^2 dari regresi-regresi ini (poin 2) kemudian dibandingkan dengan R^2 model utama. Jika lebih tinggi, maka di dalam model terdapat multikolinierita

5.4. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka penelitian ini menyatakan hipotesis :

1. Diduga jumlah penghimpunan dana bank, tingkat suku bunga kredit, total aset secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan
2. Diduga jumlah penghimpunan dana bank berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan
3. Diduga tingkat suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan
4. Diduga total aset berpengaruh secara signifikan positif terhadap jumlah kredit yang diberikan

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

6.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan, dan data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait yang mendukung tujuan penelitian ini. Data yang digunakan bersumber dari:

- a) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati.
- b) PD BPR BKK pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pati.

Adapun data-data yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kredit yang diberikan

Data yang digunakan adalah data jumlah posisi kredit yang diberikan pada 20 PD BPR BKK se-Kabupaten Pati. Data diperoleh dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati yang dinyatakan dalam ribuan rupiah.

2. Jumlah penghimpunan dana bank

Data yang digunakan adalah data jumlah posisi penghimpunan dana bank yang diperoleh dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pati yang dinyatakan dalam ribuan rupiah.

3. Tingkat suku bunga kredit

Data yang digunakan adalah data tingkat suku bunga kredit yang diperoleh dari survey lapangan di 20 PD BPR BKK se-Kabupaten Pati dan dinyatakan dalam persen per tahun.

4. Total Aset

Merupakan total aset atau total aktiva yang dinyatakan dalam ribuan rupiah dan diperoleh dari Bagian Perekonomian Kabupaten Pati dalam rekapitulasi neraca bulanan.

6.2. Variabel Operasional

1. Kredit (pinjaman) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
2. Suku bunga kredit adalah tambahan nilai tertentu yang diberikan oleh nasabah kepada pihak BPR yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pokok pinjaman sebagai kompensasi pemberian pinjaman.
3. Jumlah Penghimpunan Dana (dana pihak ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas berupa simpanan deposito berjangka dan simpanan tabungan dimana merupakan sumber dana yang dikelola atau diolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan.
4. Total Asset (aktiva) adalah sumber-sumber yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang terdiri dari kas dan sumber-sumber lain yang likuid. Aktiva juga meliputi semua cost yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.

6.3. Pengujian Estimasi

Untuk menentukan parameter α , metode yang digunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh penaksir tidak bias

linier terbaik. Hasil estimasi yang dipilih adalah dengan model regresi biasa karena memberikan hasil yang lebih baik.

Pengujian hasil estimasi hubungan antara variabel dependen secara statistik. Prosedur analisis yang dilakukan meliputi pengujian variabel penjelas secara individu, pengujian secara bersama-sama dan pengujian terhadap asumsi klasik.

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang terjadi dan untuk mempermudah proses estimasi dalam penelitian ini dihitung dengan bantuan komputer, menggunakan program Eviews 3.0. Hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1

Hasil regresi

Dependent Variable: KBPR
 Method: Least Squares
 Date: 10/03/04 Time: 12:01
 Sample: 1 20
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3470380.	968574.6	-3.582976	0.0025
SBK	124006.8	42627.36	2.909089	0.0102
DJN	0.387988	0.159483	2.432790	0.0271
AJN	0.441528	0.108739	4.060420	0.0009
R-squared	0.976068	Mean dependent var		3569129.
Adjusted R-squared	0.971580	S.D. dependent var		1430191.
S.E. of regression	241103.4	Akaike info criterion		27.80070
Sum squared resid	9.30E+11	Schwarz criterion		27.99984
Log likelihood	-274.0070	F-statistic		217.5172
Durbin-Watson stat	1.887558	Prob(F-statistic)		0.000000

6.4. Pengujian Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dapat digunakan atau tidaknya model yang dipakai sebagai penduga secara statistik maka diadakan pengujian secara parsial dan pengujian secara serempak.

6.4.1. Pengujian Secara Parsial

Pengujian secara parsial ini dilakukan dengan menggunakan uji t satu sisi (*one tail significance*) terhadap masing-masing variabel bebas, dari hasil pengujian regresi didapat nilai t hitung dari masing-masing variabel bebas untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel adalah: $t_{tabel} = t_{\frac{1}{2} \alpha \text{ df}}$ (n-k)

Dimana:

α = tingkat signifikansi

df = derajat bebas

n = jumlah data

k = jumlah parameter

Dengan demikian maka dapat ditentukan nilai t tabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.01 dan derajat bebas (20-4) sebesar 16 maka nilai t tabel di dapat 2.583.

Apabila nilai t hitung > t tabel, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika t hitung < t tabel, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil pengujian regresi didapat t hitung seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Nilai *t* hitung Variabel Bebas

Variabel	t hitung	α	t tabel	keterangan
SBK	2.909089	1%	2.583	signifikan
DJN	2.432790	5%	1.746	signifikan
AJN	4.060420	1%	2.583	signifikan

6.4.1.1. Variabel Suku Bunga Kredit

1. $H_0: \beta_1 < 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.
2. $H_a: \beta_1 > 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Koefisien regresi variabel SBK 124006.8 dan standar error sebesar 42627.36. Sedangkan besarnya t hitung adalah 2.909089 dengan $\alpha = 1\%$ dan derajat bebas $df = 16$ diperoleh nilai t tabel sebesar 2.583. Karena t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak secara statistik, berarti bahwa suku bunga kredit berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat.

6.4.1.2. Variabel Jumlah Penghimpunan Dana Bank

1. $H_0: \beta_1 < 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.

2. $H_a: \beta_1 > 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Koefisiensi regresi variabel DJN 0.387988 dan standar error sebesar 0.159483 sedangkan t hitung adalah 2.432790, dengan $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas $df = 16$ diperoleh nilai t tabel sebesar 1.746. Karena t hitung $>$ ta tabel maka H_0 ditolak secara statistik, berarti bahwa jumlah penghimpunan dan bank berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat.

6.4.1.3. Variabel Total Aset

1. $H_0: \beta_1 < 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.
2. $H_a: \beta_1 > 0$; artinya variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Koefisien regresi variabel AJN 0.441528 dan standar error sebesar 0.108739 sedangkan besarnya t hitung adalah 4.060420 dengan $\alpha = 1\%$ dan derajat bebas $df = 16$ diperoleh t tabel sebesar 2.583. Karena t hitung $<$ t tabel maka H_0 ditolak secara statistik, berarti bahwa total aset berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat.

6.4.2. Pengujian Secara Serempak

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bila hasil pengujian menunjukkan nilai:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen
2. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Langkah pengujian serempak hampir sama dengan pengujian secara parsial yaitu dengan membandingkan nilai hitung terhadap nilai tabel, dalam hal ini yang digunakan adalah nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. Adapun cara mencari nilai F tabel adalah dengan mencari derajat bebas pembilang ($k-1$) dan derajat bebas penyebut ($n-k$).

Dengan tingkat signifikansi 0.01 serta derajat bebas numerator sebesar 3 dan derajat bebas denominator sebesar 16 maka nilai F tabel untuk F (3,16) adalah sebesar 5.29, sedangkan nilai F hitung dari hasil estimasi regresi sebesar 217.5172. Karena nilai F hitung $>$ F tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Artinya bahwa suku bunga kredit, jumlah penghimpunan dan, total aset berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat.

6.4.3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Pengujian ini adalah melalui koefisien determinasi. Pengujian ini ditujukan untuk melihat kemampuan variabel-variabel independen dalam menerapkan variabel dependennya.

Dari hasil estimasi tersebut diperoleh nilai R^2 sebesar 0.976068, artinya bahwa variabel independen yang ada dalam model persamaan regresi

mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 97% sedangkan sisanya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang termasuk dalam variabel bebas pada persamaan regresi yang diestimasi.

6.5. Pengujian Asumsi Klasik

6.5.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu asumsi dimana satu atau lebih dari variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier diantara variabel-variabel dalam model regresi. Dengan mengikuti teori Klein yaitu dengan melakukan regresi antara variabel penjelasnya (independen) untuk mengetahui besarnya R^2 dari masing-masing hubungan antar variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari R^2 keseluruhan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model tersebut:

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b) Menggunakan cara regresi parsial, caranya:
 1. Lakukan estimasi pada model awal $Y = f(X_1, X_2, X_3)$, dapatkan nilai R^2 -nya.
 2. Lakukan auxiliary regression antar variabel penjelas.

3. Nilai R^2 dari dari regresi-regresi ini (poin 2) kemudian dibandingkan dengan R^2 model utama. Jika lebih tinggi, maka di dalam model terdapat multikolinieritas.

Tabel 6.3

Analisis Multikolinieritas

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
SBK_AJN DJN	0.755700	0.976068	Tidak ada multikolinieritas
AJN_SBK DJN	0.882924	0.976068	Tidak ada multikolinieritas
DJN_SBK AJN	0.925750	0.976068	Tidak ada multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa r^2 dari uji antar variabel independen lebih kecil daripada R^2 dari uji regresi model utama, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dengankata lain tidak ada hubungan antar variabel penjelas yang berarti signifikan variabel.

6.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan, asumsi tersebut menyatakan bahwa varian U_i di sekitar rerata nolnya tidak tergantung padanilai variabel bebas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas salah satunya digunakan *uji Park*, yaitu dengan melakukan regresi e_i^2 sebagai proxy dari faktor pengganggu yang digunakan selaku variabel terikatnya. Jika β ternyata secara statistik signifikan, maka hal ini menunjukkan kehadiran situasi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan. Sebaliknya jika β secara statistik tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa *disturbance term* bersifat homoskedastisitas.

Tabel 6.4**Hasil Uji Park**

Hasil uji Park untuk model persamaan regresi yang diteliti adalah

Dependent Variable: LRES2

Method: Least Squares

Date: 09/08/04 Time: 15:10

Sample: 1 20

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.971949	26.10766	0.190440	0.8514
LSBK	11.43930	12.21722	0.936326	0.3630
LDJN	-2.039468	5.367204	-0.379987	0.7090
LAJN	-0.803767	4.765963	-0.168647	0.8682
R-squared	0.058002	Mean dependent var		0.385690
Adjusted R-squared	-0.118623	S.D. dependent var		2.487400
S.E. of regression	2.630797	Akaike info criterion		4.949307
Sum squared resid	110.7375	Schwarz criterion		5.148454
Log likelihood	-45.49307	F-statistic		0.328391
Durbin-Watson stat	1.583359	Prob(F-statistic)		0.804880

Dengan melihat koefisien parameter β , maka tidak ada yang signifikan.

Dengan kata lain tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model persamaan regresi yang diamati.

6.5.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau cross-sectional data). Pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson, yaitu dengan menempatkan d statistik ke dalam daerah

pengujian autokorelasi yang disusun setelah mengetahui nilai dL serta dU yang didapat dari tabel Durbin-Watson dengan keterangan sebagai berikut;

N adalah jumlah data

K' adalah jumlah variabel bebas

DL adalah batas bawah

DU adalah batas atas

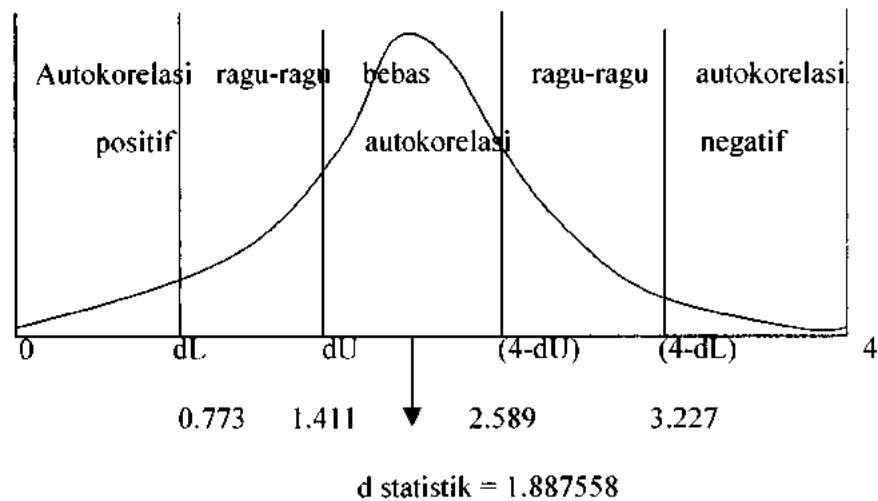
Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.01 serta $n=20$ dan $k'=3$ maka didapat:

$$DL=0.773 \quad 4-dL=3.227 \quad \text{nilai } d \text{ statistik} = 1.887558$$

$$DU=1.411 \quad 4-dU=2.589$$

Gambar 6.1

Analisis Uji Autokorelasi



Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- ◆ Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (upper bound, U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.

- ◆ Bila nilai DW lebih rendah daripada batas atas bawah (lower bound, L), koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya, ada autokorelasi positif.
- ◆ Bila DW terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan. (Mudrajat Kuncoro,2001:107)

Dari hasil estimasi model regresi diperoleh d statistik sebesar 1.887558, yang berarti terletak pada daerah bebas autokorelasi. Dengan kata lain didalam data penelitian yang diestimasi ini tidak terdapat autokorelasi atau bebas autokorelasi.

6.6. Hasil Estimasi Data

Hasil estimasi dari data tersebut dapat pula dituliskan sebagai berikut:

$$KBPR = -3470380 + 124006.8SBK + 0.387988DJN + 0.441528AJN$$

Karena model linier, maka parameter regresi merupakan elastisitas dari variabel yang bersangkutan:

1. Tanda parameter untuk SBK atau tingkat suku bunga kredit adalah positif berarti jika SBK naik 1% maka jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh BPR akan naik sebesar 124006.8 ribu rupiah
2. Tanda parameter untuk DJN atau jumlah penghimpunan dana bank adalah positif berarti jika DJN naik 1ribu maka jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh BPR akan naik sebesar 0.387988 ribu rupiah
3. Tanda parameter untuk AJN atau total aset adalah positif berarti jika AJN naik 1ribu maka jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat akan naik sebesar 0.441528 ribu rupiah

6.7. Analisis Ekonomi

Pembahasan secara ekonomi dilakukan sebagai analisis lanjutan dari pengujian statistik yang sudah terhadap model persamaan model regresi yang diestimasi. Dan selanjutnya dikaitkan dengan teori maupun kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi serta mempengaruhi kegiatan ekonomi selama tahun penelitian.

6.7.1. Tingkat Suku Bunga Kredit

Salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit kepada masyarakat dari Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati adalah tingkat suku bunga kredit. Dalam analisis ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga kredit mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat. Artinya ketika tingkat suku bunga kredit naik maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dan hal ini sejalan dengan tujuan BPR dalam mendapatkan margin keuntungan yang diperoleh dari suku bunga kredit.

Dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari SBK terhadap jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat.

6.7.2. Jumlah Penghimpunan Dana Bank

Selain itu variabel yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit kepada masyarakat dari Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati adalah jumlah penghimpunan dana bank. Dalam analisis ini menyatakan bahwa jumlah penghimpunan dana bank mempunyai korelasi positif dan signifikan

terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Artinya ketika jumlah penghimpunan dana bank masyarakat berasal dari tabungan dan deposito meningkat maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari DJN terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat.

6.7.3. Total Aset

Variabel lainnya adalah total aset dari Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati. Dalam analisis ini menyatakan bahwa total aset mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Artinya ketika total aset, yang merupakan seluruh kekayaan dari bank meningkat maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

Dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari AJN terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit di Kabupaten Pati, dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama tingkat suku bunga kredit BPR, jumlah penghimpunan dana bank dan total aset memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik yaitu: uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
2. Secara individu variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati artinya bahwa besar kecilnya penyaluran kredit sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga kredit, jumlah penghimpunan dana bank dan total aset. Besarnya pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Suku Bunga Kredit

Dari hasil pengujian statistik, diperoleh nilai koefisien untuk variabel tingkat suku bunga kredit sebesar 124006.8. Hal ini memberi arti bahwa

kenaikan 1% dari suku bunga kredit akan menaikkan penyaluran kredit kepada masyarakat dari Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati sebesar 124006.8 ribu rupiah, dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari suku bunga kredit terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dengan naiknya suku bunga kredit Bank Perkreditan Rakyat ternyata justru menaikkan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat karena besarnya tingkat keuntungan yang diinginkan oleh BPR tersebut.

2) Jumlah Penghimpunan Dana Bank (DJN)

Variabel kedua yang diestimasi adalah jumlah penghimpunan dana bank dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai koefisien untuk variabel DJN sebesar 0.387988. Hal ini berarti bahwa kenaikan 1ribu dari DJN akan menaikkan penyaluran kredit kepada masyarakat dari Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati sebesar 0.387988 ribu rupiah, dengan demikian hal ini sejalan dengan hipotesis awal dari penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan dan positif dari DJN terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat. Adapun jumlah penghimpunan dana bank untuk Bank Perkreditan Rakyat diperoleh dari dana pihak ketiga yang berasal dari tabungan dan deposito.

3) Total Aset (AJN)

Sesuai pengujian statistik diperoleh nilai koefisien untuk variabel total aset bulan Januari sebesar 0.441528. Hal tersebut memberi arti bahwa kenaikan 1ribu dari AJN akan menaikkan penyaluran kredit kepada

masyarakat pada bulan Januari dari oleh Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati sebesar 0.441528 ribu rupiah. Artinya bahwa total aset yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan penyaluran kredit yang disalurkan kepada masyarakat.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, sehubungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut:

- 1) Adanya kredit BPR diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat karena mekanisme penyaluran kredit yang diberikan tidak memerlukan peraturan yang menyulitkan sehingga kredit mudah diperoleh masyarakat. Dengan memanfaatkan kredit BPR secara maksimal akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatnya DJN berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat, karena DJN menunjukkan kinerja suatu bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Dengan kata lain menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut untuk menyimpan dananya.
- 3) Aset dianggap sebagai salah satu strategi dalam melaksanakan tujuan perencanaan strategis di bidang dana atau keuangan. Dalam pengelolaan aset, manajemen likuiditas menjadi salah satu aspek penting. Likuiditas diharapkan dapat menghasilkan pendapatan maksimal, disamping diperhitungkannya faktor jaminan untuk para deposan maupun penarik-penarik kredit. Meningkatnya aset maka BPR dapat mencapai margin

bunga atau net interest margin yang maksimal. Semua itu bisa menjadi acuan bagi BPR untuk lebih fokus lagi terhadap perkembangan aset mereka untuk keperluan selanjutnya terutama penyaluran kredit.

- 4) Menjaga fluktuasi tingkat suku bunga kredit, meskipun tidak terlalu berpengaruh tetap harus dijaga kestabilannya karena dampak yang diakibatkan terhadap perekonomian secara makro cukup besar. Dalam hal ini tentunya juga akan menjadi pertimbangan baik bagi pihak perbankan dalam menentukan besarnya jumlah kredit yang diberikan maupun masyarakat yang akan mengambil kredit.

7.3. Kelemahan Skripsi

Skripsi ini mempunyai kelemahan karena adanya faktor lain yang berpengaruh tapi gagal untuk dimasukkan dalam model yaitu tingkat kemacetan dan komposisi resiko asset.